

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

Indonesia. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keimigrasian*. UU No. 6 Tahun 2011. Lembaran Negara RI Tahun 2011.

———. 1996. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perairan Indonesia*. UU No. 6 Tahun 1996. Lembaran Negara RI Tahun 1996.

*Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.*

*United Nations Convention against Transnational Organized Crime.*

### B. Buku

Hamidi, J. *Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Jusnadi, A. *Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antar Negara*. Jakarta: Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Direktorat Jenderal Pemerintahan Departemen Dalam Negeri, 2005.

Kusumaatmadja, M. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni, 2003.

Lee, E. *Teori Migrasi*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 2000.

Mauna, B. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni, 2005.

Meliala, A. *Pemantapan Legalitas dan Kebijakan Menyangkut Penyelundupan Manusia*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, 2011.

Nainggolan, P. *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang*. Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2009.

Parthiana, I Wayan. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.

Pigay, N. *Migrasi Tenaga Kerja Internasional (Sejarah, Fenomena, Masalah dan Solusinya)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Santoso, M. *Perspektif Imigrasi dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Jakarta: Perum. Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007.

Shaw, M. *International Law*. Jakarta: Cambridge University Press, 2004.

Wagiman, S. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

### C. Lain-Lain

Armansyah, A. (2019). Penegakkan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Secara Illegal. *Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (2).

Dewi, D. (2017). Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) di Indonesia: Tanggung Jawab Indonesia dan Australia. *Padjajaran Journal Of International Law*, 1 (1).

Gerungan, L. (2016). Penegakkan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Lex Et Societatis*, 4 (5).

Ilmih, A. (2017). Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, 3 (1).

Indonesia, "kejahatan Lintas Negara". *Kemenlu.go.id*.

*International Organization for Migration (IOM)*. *iom.go.id*.

"Izin Tinggal Bagi Orang Asing di Indonesia". *indonesia.go.id*.

Johan, E. (2013). Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Illegal dan Hubungannya dengan Kedaulatan Negara. *Yuridika Jurnal Ilmu Hukum*, 28 (1).

Junef, M. (2020). Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia (Study Of People Smuggling Practices In Indonesian). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20 (1).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *kbbi.go.id*.

Martha, I. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5 (1).

Maulana, I. (2016). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Imigran Illegal Yang Menuju Australia Tahun 2012-2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3 (2).

- Nainggolan, P. (2009). *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang*. Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).
- \_\_\_\_\_. (2010). Imigran Gelap di Indonesia: Masalah dan Penanganannya. *Kajian*, 15 (10).
- Nurdianto, A. (2020). Kebijakan Hukum Dalam Penanganan Imigran Ilegal. *Juristic*, 1 (1).
- Prameswari, N. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling). *Jurnal Kerthanegara*, 8.
- Rahayu, N. (2017). Implementasi Kebijakan Indonesia Dalam Menangani Imigran Ilegal. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4 (2).
- Santoso, M. (2018). Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian. *Jurnal Bina Mulya Hukum*, 7 (1).
- Sitompul, M. (2015). Penyelundupan Imigran Di Perairan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Jurnal Belli Ac Pacis*, 1 (2).
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). unhcr.go.id.*
- Utami, L. (2015). Suatu Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling). *Jurnal Kerthanegara*, 3 (3).